

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

PELAYANAN KESEJAHTERAAN BERBASIS *FAITH-BASED ORGANIZATION*: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Meilanny Budiarti Santoso¹, Hadiyanto A. Rachim², Gigin, G. Kamil Basar³

¹Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email: meilanny.budiarti@unpad.ac.id¹, hadiyantoarachim@unpad.ac.id², gigin@unpad.ac.id³

Submitted : 20 November 2024, Accepted : 14 Januari 2025, Published: 04 Februari 2025

ABSTRAK

Penelitian dengan mengungkap topik pelayanan kesejahteraan berbasis *faith-based organization* sebagai peluang dan tantangan bagi praktik pekerjaan sosial telah memiliki jejak historis yang cukup panjang sekaligus menunjukkan dinamika kontributif serta determinan tersendiri dalam memberikan alternatif layanan kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaat, yang faktanya tidak seluruhnya dapat dijangkau dan dipenuhi oleh organisasi-organisasi resmi pemberi pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Kajian ini melihat karakteristik layanan kesejahteraan sosial berbasis *faith-based organization*, pemangku kepentingan dalam *faith-based organization*, dan pekerjaan sosial dalam bidang *faith-based organization* dalam menjawab peluang dan tantangan global yang bersifat inklusif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan analisis isi yang merujuk kepada berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian untuk melihat diskursus *faith-based organization* pada layanan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik *faith-based organization* ditunjukkan dalam bentuk *branding* organisasi, struktur organisasi, tujuan, dan penyedia layanan melalui skema pasif-aktif dan persuasif-eksklusif; *faith-based organization* menjadi model dalam menjalankan layanan kesejahteraan sosial yang inklusif dalam upaya menghindari dikotomi layanan kesejahteraan sosial antara organisasi sekuler vis a vis organisasi keagamaan; dalam pengelolaan dan menjalankan aktivitas organisasinya para pemangku kepentingan *faith-based organization* dapat sejalan dengan nilai-nilai dan kode etik profesi pekerjaan sosial profesional.

Kata kunci: *faith-based organization*, kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, organisasi pelayanan sosial

ABSTRACT

Research on welfare services based on faith-based organizations as opportunities and challenges for social work practice has a long historical trajectory, highlighting both its contributive dynamics and unique determinants in providing alternative social welfare services for beneficiaries. These services, in fact, cannot entirely be reached or fulfilled by official government-managed social welfare service organizations. This study examines the characteristics of social welfare services provided by faith-based organizations, the stakeholders involved in such organizations, and the role of social work in faith-based organizations in addressing global opportunities and challenges in an inclusive manner. The research method used in this study is a literature review with content analysis, referring to various sources relevant to the research topic to explore the discourse on faith-based organizations in social welfare services. The findings indicate that the characteristics of faith-based organizations are reflected in their branding, organizational structure, objectives, and service provision through passive-active and persuasive-exclusive schemes. Faith-based organizations serve as a model for delivering inclusive social welfare services, aiming to avoid the dichotomy of social welfare services between secular organizations and religious organizations. In managing and carrying out their organizational activities, stakeholders in faith-based organizations can align with the values and ethical codes of the professional social work profession.

Keywords: *faith-based organization, social welfare, social welfare services, social work, social service organization*

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai peran *faith-based organization* dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan telah dipertanyakan di banyak negara sejak beberapa dekade terakhir (misalnya Bäckström et al., 2010, 2011; Ellenson, 2006; Gocmen, 2013; Jeppsson Grassman 2010). Hal tersebut sejalan dengan populasi global dari tenaga kerja kemanusiaan yang telah bekerja atas dasar agama, yaitu mencapai angka 90% dan sebagian besar lembaga tempat mereka bekerja didasarkan pada landasan agama (Ager & Ager, 2011).

Faith-based organization seringkali menjadi garda depan dalam menyediakan layanan bagi mereka yang terpinggirkan secara sosial (Angell, 2010). *Faith-based organization* di banyak negara telah mengembangkan reputasi dalam menyediakan layanan inovatif yang belum ditetapkan atau dianggap perlu oleh pemerintah (Holden & Trembath 2008; Scales, 2011). Hal ini berkaitan dengan isu-isu sosial yang baru muncul (Fix & Fix, 2002) dan ketika desain layanan yang disediakan oleh pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan (Gardner, 2006).

Bahkan penyedia layanan kesejahteraan berbasis agama menjadi bagian dari tren yang lebih besar dalam masyarakat global dan tidak dapat lagi diabaikan seperti yang banyak dilakukan pada abad ke-20 (Campbell, 2009; Gray et al., 2009), dan pada tahun-tahun awal abad ke-21 telah terlihat adanya minat terhadap peran *faith-based organization* dalam aspek penyedia layanan sosial yang didukung oleh kebijakan pemerintah di sejumlah negara, seperti di Australia (Ayton et al., 2012; Holden & Trembath 2008), Inggris (Harris et al., 2003), Amerika Serikat (Unruh & Sider 2005), Kanada (Hiemstra, 2002) dan Selandia Baru (Milligan & Conradson, 2011).

Upaya eksplorasi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah '*faith-based organization*' telah banyak dilakukan. Namun, menunjukkan bahwa tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai apa yang dimaksud dengan *faith-based organization* dan demikian pun saat mengeksplorasi serangkaian kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi dapat dianggap 'berbasis agama' atau tidak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hugen & Venema (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada konsensus mengenai apa istilah '*faith-based organization*'. Alison (2010) mempertanyakan apakah istilah '*faith-based organization*'

merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan inisiatif kelompok agama yang menganggap 'iman' bukan merupakan komponen kunci dari agama mereka? Dalam hal ini, ekspresi keimanan mencakup *branding* sebuah organisasi, struktur organisasi, bagaimana organisasi tersebut memahami tujuannya, dan peran agama dalam penyediaan layanan (Cnaan & Boddie, 2006; Unruh & Sider, 2005).

Namun demikian, Crisp (2014) menjelaskan pengertian dari '*faith-based organization*' yang diadopsi dari 'lembaga pelayanan sosial' yang secara tegas mengidentifikasikan diri dengan suatu tradisi keagamaan dan/atau dinaungi oleh organisasi keagamaan atau komunitas atau organisasi keagamaan mana pun. Dalam hal ini, program atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga berbasis agama belum tentu memiliki konten keagamaan. Terkait hal tersebut, Angell (2010: 75) menyatakan bahwa layanan kesejahteraan 'berbasis agama' merupakan sebuah situs di mana yang dipandang suci berinteraksi dengan yang sekuler.

Faith-based organization yang memiliki hubungan komunitas yang kuat sering kali mampu menjangkau sebagian masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh penyedia layanan lain (Fagan et al., 2010; Paton et al., 2009). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Dinham (2012a) yang menyatakan bahwa kelompok agama adalah penyedia layanan sosial yang aktif di wilayah pinggiran masyarakat di mana penyedia layanan lain sering kali menarik layanannya. Selain itu, *faith-based organization* tidak hanya sekedar fokus pada kebutuhan kesejahteraan yang paling mendesak, namun juga berupaya memenuhi kebutuhan spiritual penerima layanan, jika memungkinkan. Hal ini tidak berarti diskusi terbuka mengenai keyakinan atau praktik keagamaan, melainkan mencerminkan orientasi yang menganggap seseorang lebih dari sekadar kebutuhan materi dan fisiknya (Fokas, 2006).

Sebagai sebuah profesi pertolongan, profesi pekerjaan sosial memiliki sejarah panjang dalam keterkaitannya dengan pelayanan berbasis agama. Badan-badan kesejahteraan di bawah naungan gereja merupakan organisasi non-pemerintah pertama yang mempekerjakan pekerja sosial profesional (Holden & Trembath, 2008) dan menekankan bahwa program konseling yang didanai pemerintah dikelola oleh pekerja sosial yang memenuhi syarat (Gleeson, 2008b).

Sejak beberapa dekade terakhir, upaya untuk mengetahui jumlah pekerja sosial yang bekerja pada *faith-based organization* membutuhkan upaya yang besar (Cnaan et al., 1999; Dinham, 2009). Hal tersebut dikarenakan pelayanan kesejahteraan berbasis agama tidak selalu dikenal, bahkan oleh masyarakat luas dan jaringan layanan bagi manusia (Grønbjerg & Nelson, 1998). Selain itu, organisasi-organisasi yang diduga mempekerjakan pekerja sosial belum tentu melakukan pendataan secara khusus (Northern, 2009; Schwartz et al., 2008). Di sisi lain, bagi pekerja sosial profesional, terdapat potensi ketegangan jika nilai-nilai agama yang mendasari organisasi bertentangan dengan kode etik profesi. Sejalan dengan hal tersebut, banyak *faith-based organization* saat ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip praktik terbaik.

Meskipun mengakui berbagai keterbatasan tersebut, namun diharapkan beberapa gagasan dan wawasan yang dihasilkan dapat menstimulus pemikiran dan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pekerjaan sosial berbasis agama dalam konteks lain. Fakta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan kesejahteraan yang dilakukan oleh *faith-based organization* yang sejatinya menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi praktik pekerjaan sosial profesional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat menggambarkan pelayanan kesejahteraan berbasis *faith-based organization* sebagai peluang sekaligus tantangan bagi praktik pekerjaan sosial profesional. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik studi literatur dan studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku, ebook, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan. Pengeolahan data dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi yang meliputi membaca, pengkategorian, dan analisis informasi yang diperoleh dari sumber literatur kemudian membandingkan dan menginterpretasi temuan yang didapat secara holistik (Asarroudi et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik *Faith-Based Organization*

Faith-based organization dipahami sebagai lembaga pelayanan sosial yang secara tegas mengidentifikasi diri dengan suatu tradisi keagamaan dan/atau dinaungi oleh organisasi keagamaan atau komunitas atau organisasi keagamaan mana pun. Namun demikian, *faith-based organization* dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, seperti halnya yang dikemukakan oleh Cnaan & Boddie (2006) dan Unruh & Sider (2005) bahwa pada *faith-based organization*, ekspresi keimanan mencakup merek (*branding*) dari sebuah organisasi, struktur organisasi, tujuan organisasi dan peran agama sebagai penyedia layanan. Berbagai karakteristik *faith-based organization* tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Crisp (2014) sebagai berikut:

1) Merek

Merek (*branding*) sebuah organisasi, termasuk nama dan tandanya, sering kali merupakan indikasi pertama bahwa organisasi tersebut mempunyai dasar keyakinan, namun hal ini belum tentu merupakan prediksi yang akurat, karena beberapa *faith-based organization* sengaja memilih nama yang tidak memiliki konotasi keagamaan (Ebaugh et al., 2003). Pencitraan merek visual juga bisa digunakan untuk mempromosikan pesan-pesan mengenai sejauh mana suatu organisasi berbasiskan agama (Ebaugh et al., 2003). Namun demikian, ada kalanya dalam pemberian nama, sejumlah pendanaan program eksternal mengharuskan organisasi tuan rumah untuk mempromosikan nama programnya, bukan nama organisasi yang mendukungnya. Hal ini dapat mencakup penggunaan program dan bukan kop surat lembaga, sehingga pengguna layanan mungkin tidak menyadari bahwa layanan yang mereka terima sebenarnya disediakan oleh *faith-based organization* (Crisp, 2014).

Terkait hal tersebut, Tangenberg (2005) menjelaskan bahwa penggunaan logo 'berbasis agama' tidak menjadi prioritas dan hal tersebut tidak mencerminkan berkurangnya keyakinan agama dalam landasan atau nilai-nilai organisasi, melainkan mewakili keputusan sadar bahwa keyakinan mereka paling baik diungkapkan dalam cara mereka memperlakukan pengguna layanan daripada dalam bentuk penggunaan simbol atau papan tanda.

2) Struktur Organisasi

Karakteristik nasional dan agama dapat mempengaruhi penyelenggaraan layanan kesejahteraan berbasis agama. Layanan-layanan tersebut, meskipun sering kali didasari oleh ajaran agama, lebih merupakan kebutuhan untuk mengambil tanggung jawab komunal bagi anggota masyarakat yang mengalami kerugian, dan bukan identitas berbasis agama yang jelas (Wittberg, 2013). *Faith-based organization* biasanya memiliki tingkat afiliasi tertentu dengan konstituen agama, dan afiliasi agama inilah yang membedakan mereka dari organisasi sekuler (Ferris, 2005). Selain itu, terdapat organisasi *faith-based organization* yang dapat beroperasi secara independen dari institusi agama dan hanya memiliki hubungan informal dengan hierarki agama (Deines, 2008).

Aspek kunci dari struktur organisasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam organisasi, sehingga kepemimpinan yang terampil dalam mengelola lembaga kesejahteraan dan adanya proses yang mencerminkan keyakinan agama dari lembaga keagamaan tersebut menjadi penting keberadaannya (Schneider, 1999). Motivasi positif yang dimiliki oleh dewan manajemen sebuah *faith-based organization* dapat dengan mudah mengarah pada pengambilan keputusan dalam *faith-based organization* yang setidaknya sebagian didasarkan pada pemeliharaan etika atau nilai-nilai dan bukan hanya berdasarkan alasan rasional (Torry, 2005). Oleh karena itu, Clarke & Jennings (2008: 6) mengusulkan bahwa istilah '*faith-based organization*' mengacu pada 'organisasi mana pun yang memperoleh inspirasi dan panduan untuk kegiatannya dari ajaran dan prinsip-prinsip agama atau dari interpretasi atau aliran pemikiran tertentu di dalam imannya.

3) Tujuan

Meskipun *faith-based organization* adalah organisasi yang identitas dan tujuannya berasal dari tradisi agama atau spiritual tertentu (Berger, 2003; Palmer, 2011), organisasi yang muncul dari tradisi agama yang sama dapat mengembangkan pemahaman yang berbeda mengenai tujuan mereka seharusnya (Cameron, 2004). Beberapa organisasi keagamaan telah memahami bahwa tujuan mereka adalah memberikan layanan kepada

anggota masyarakat yang kurang beruntung dengan sedikit atau tanpa harapan untuk mengubah keyakinan dan praktik keagamaan orang-orang yang menerima layanan tersebut (Davies-Kildea, 2007).

Clarke (2008: 32–33) menjelaskan tentang peran *faith-based organization* dalam studi pembangunan dan mengusulkan pemikiran, bahwa daripada melakukan dikotomi antara ekspresi agama yang implisit dan eksplisit, lebih baik membangun sebuah kontinum. Secara khusus, Clarke mencatat empat cara utama di mana iman memanifestasikan dirinya dalam pekerjaan organisasi *faith-based organization*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pasif*: Ajaran agama (atau sub-iman) merupakan tambahan dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas sebagai motivasi untuk bertindak dan dalam memobilisasi staf dan pendukung serta memainkan peran sekunder dibandingkan pertimbangan kemanusiaan dalam mengidentifikasi, membantu atau bekerja dengan penerima manfaat dan mitra.
- b. *Aktif*: Iman memberikan motivasi yang penting dan eksplisit untuk bertindak dan dalam memobilisasi staf dan pendukung. Organisasi ini memainkan peran langsung dalam mengidentifikasi, membantu atau bekerja dengan penerima manfaat dan mitra, meskipun tidak ada diskriminasi terbuka terhadap orang-orang yang tidak beragama dan organisasi ini mendukung kerja sama multi-agama.
- c. *Persuasif*: Iman memberikan motivasi yang penting dan eksplisit untuk bertindak dan dalam memobilisasi staf dan pendukung. Hal ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, membantu atau bekerja dengan penerima manfaat dan mitra, serta memberikan dasar yang dominan untuk keterlibatan. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan hal baru berpindah agama (atau salah satu cabang agama tertentu) dan/atau untuk memajukan kepentingan agama/sub-iman tersebut dengan mengorbankan orang lain.

- d. *Eksklusif*: Iman memberikan motivasi utama untuk bertindak dan dalam memobilisasi staf dan pendukung. Hal ini memberikan pertimbangan utama atau satu-satunya dalam mengidentifikasi penerima manfaat. Keterlibatan sosial dan politik berakar pada keyakinan, atau salah satu cabang keyakinan, dan seringkali bersifat militan atau kekerasan, dan/atau ditujukan terhadap satu atau lebih keyakinan yang berlawanan.

Clarke (2008) mencatat bahwa *faith-based organization* kategori pertama dan kedua yang paling mungkin menarik dukungan, termasuk sumbangan keuangan, dari komunitas luas. Selain itu, organisasi-organisasi keagamaan mungkin benar-benar percaya bahwa mengatasi permasalahan kemanusiaan lebih mendesak daripada menangani praktik keagamaan. Misalnya saja, Islamic Relief di Bangladesh mengakui bahwa fasilitas ibadah komunitas yang tersedia di kamp pengungsi tidak sesuai, namun mereka menganggap prioritasnya adalah memastikan standar hidup dasar dalam hal makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi (Palmer, 2011).

Namun demikian, keempat kategori organisasi yang dikemukakan oleh Clarke (2008) secara potensial memungkinkan adanya *faith-based organization* 'profetik' (Campbell, 2012: 101) dan 'untuk merawat yang rentan' (Campbell, 2012: 102). Selain itu, meskipun secara eksplisit hasil keagamaan hanya disebutkan dalam dua kategori terakhir dari pandangan Clarke, (2008), sampai batas tertentu hal ini mungkin juga mendasari harapan para pemangku kepentingan dalam dua kategori pertama (Fischer & Stelter, 2006). Setiap tipologi layanan kesejahteraan berbasis agama pasti mempunyai keterbatasan (Dinham et al., 2009), termasuk variasi praksis yang cukup besar di dalam dan antar tradisi agama (Macey & Carling, 2011).

4) Penyedia Layanan

Seringkali berkaitan erat dengan bagaimana suatu organisasi memandang tujuannya adalah sifat dari penyediaan layanan. Organisasi kesejahteraan berbasis agama memiliki cakupan yang beragam, mulai dari yang menawarkan layanan tunggal hingga lembaga multi-program dan/atau multi-lokasi besar yang memberikan layanan terhadap

berbagai kebutuhan masyarakat (Rogers et al., 2005) pada tingkat lokal, regional, dan regional berbasis nasional atau internasional (Berger, 2003).

2. Pemangku Kepentingan *Faith-Based Organization*

Demikian pun dengan kelompok pemangku kepentingan dalam *faith-based organization*, di mana masing-masing pihak memiliki perspektif dan permasalahannya masing-masing. Dinham (2009) menambahkan bahwa pada *faith-based organization* terdapat tambahan kompleksitas komunitas keagamaan yang mungkin memiliki keragaman anggota dengan perspektif berbeda mengenai layanan kesejahteraan yang didukung oleh komunitas tersebut dan hubungan antara layanan keagamaan dan kesejahteraan yang diberikan.

1) Komunitas Keagamaan

Komunitas keagamaan mungkin juga memiliki pandangan mengenai jenis layanan apa yang siap mereka dukung, dan mereka menganggap kesesuaian dengan keseluruhan misi mereka sebagai hal yang penting (Fagan et al., 2010), terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai apa yang tidak mereka dukung ataupun pada saat mereka bersedia meminjamkan nama dan/atau sumber daya yang mereka miliki (Cnaan et al., 1999; Leis-Peters, 2006). Holden & Trembath (2008) menjelaskan bahwa komunitas keagamaan sering kali memberikan dukungan besar berupa donor, relawan, sumber daya, serta dukungan moral untuk berbagai layanan kesejahteraan yang mereka ikuti. Dalam hal ini, sebagian besar kelompok agama terlibat dalam pelayanan sosial sebagai sarana untuk membuktikan keyakinan mereka, memenuhi ajaran dan keyakinan agama, atau sekadar "berbuat baik" untuk orang lain dalam masyarakat' (Cnaan et al., 1999: 300).

2) Komunitas Profesional

Pekerja sosial yang terlatih sering kali bersikap kritis terhadap kegiatan amal yang dipicu oleh sentimentalitas dan bukan berdasarkan penilaian rasional atau ilmiah (Kunzel, 1988). Namun, kenyataannya di beberapa *faith-based organization*, pekerja sosial bekerja berdampingan dengan relawan dan hal ini dapat mengakibatkan kaburnya peran (Netting et al., 2005). Ketika keyakinan agama berbenturan dengan nilai-nilai

profesional mereka (Reid, 2008), terdapat usulan bahwa keterampilan praktik reflektif dan dialog kritis dapat membantu pekerja sosial dalam mengatasi perbedaan tersebut, dan jika hal ini tidak dapat diselesaikan, setidaknya untuk lebih memahami permasalahannya (Green, 2010). Walaupun pekerja sosial harus enggan untuk mengadopsi cara kerja yang tidak sejalan dengan nilai dan prinsip pekerjaan sosial, pada saat yang sama pekerja sosial perlu memastikan bahwa pendekatan yang mereka tolak atas dasar afiliasi agama juga telah dipertimbangkan dengan baik.

3) Pemberi Dana

Bagi *faith-based organization*, aliansi strategis dengan organisasi lain yang mempunyai pemikiran serupa mungkin penting agar organisasi dapat tetap bertahan (Jawad, 2009). Pengaturan pendanaan yang kompetitif juga dapat membatasi pengaturan kerja sama antara *faith-based organization* dan penyedia layanan lain dan hal ini berlaku untuk semua ukuran *faith-based organization*.

Pada saat yang sama ketika *faith-based organization* mencari pendanaan eksternal, organisasi pemberi dana biasanya memiliki agenda mereka sendiri, yang mungkin mencakup keyakinan bahwa *faith-based organization* mampu memberikan layanan dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan organisasi dengan kategori penyedia layanan lainnya (Angell & Wyller, 2006).

Terkait perjanjian pendanaan, mungkin memerlukan kompromi baik dari *faith-based organization* maupun penyandang dana. Organisasi pemberi dana mungkin lebih condong ke *faith-based organization* yang kegiatan kesejahteraannya sangat berbeda dengan kegiatan yang tampak bersifat keagamaan (Dinham, 2009). Penerimaan dana mungkin juga mengharuskan *faith-based organization* untuk mengecilkan ekspresi eksplisit apa pun dari keyakinan dan prinsip agama mereka (Langer, 2003; Unruh & Sider 2005) atau setuju untuk tidak bersuara menentang posisi kebijakan penyandang dana mereka (Lake, 2013).

4) Pengguna Layanan

Layanan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh *faith-based organization* sering kali dianggap memiliki kualitas lebih tinggi, memberikan pendekatan yang lebih holistik dan disesuaikan dengan kebutuhan

individu (Pettersson, 2011), dan banyak pengguna layanan melaporkan bahwa mereka memiliki 'ketertarikan yang tulus' terhadap mereka, serta rasa hormat (Williamson, 2005; Williamson & Hodges, 2006).

Manfaat lebih lanjut dari kontak dengan *faith-based organization* adalah peningkatan modal sosial (Schneider, 1999), dan khususnya rasa kebersamaan yang lebih besar (Yancey & Atkinson, 2004). Pengalaman positif juga dapat menghasilkan rekomendasi positif kepada calon pengguna jasa lainnya. Namun, bagi sebagian orang, kebutuhan akan rekomendasi dari pengguna layanan lain tidak diperlukan, terutama dari mereka yang memiliki preferensi kuat terhadap layanan yang berorientasi agama (Scales & Kelly, 2011).

5) Komunitas yang Lebih Luas

Masyarakat luas mempunyai harapan terhadap *faith-based organization*, dan *faith-based organization* juga sering kali mengandalkan niat baik serta dukungan dari komunitas yang lebih luas, karena *faith-based organization* sangat dihormati oleh masyarakat luas (Crisp, 2014).

6) Susunan Pengurus

Berbagai penelitian mengenai organisasi layanan manusia secara umum cenderung memberikan perhatian yang relatif sedikit kepada dewan manajemen dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya (Ozanne & Rose, 2013). Dalam beberapa kasus, kekuasaan yang cukup besar mungkin berada di tangan pejabat yang dicalonkan dalam hierarki agama (Gardner, 2006). Dewan di beberapa *faith-based organization* berusaha merekrut anggota komunitas yang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh dewan serta kemampuan untuk meluangkan waktu mereka untuk organisasi (Harris et al., 2003).

3. Pekerjaan Sosial Pada *Faith-Based Organization*

Ada berbagai alasan mengapa pekerja sosial mencari pekerjaan di *faith-based organization*. Hal ini dapat dikelompokkan berdasarkan rasa panggilan pekerja sosial, karakteristik organisasi, dan faktor pragmatis. Berbagai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pekerjaan

Ketika bekerja di organisasi sekuler, pekerja sosial dengan keyakinan agama yang kuat mungkin merasa bahwa mereka didiskriminasi karena agama mereka, dan rekan-rekan mereka berasumsi mengetahui bagaimana orang yang beragama dapat bertindak dalam situasi tertentu (Ressler & Hodge, 2003, 2005). Oleh karena itu, mencari pekerjaan di *faith-based organization* mungkin merupakan tindakan mempertahankan diri bagi beberapa pekerja sosial yang taat beragama (Thyer & Myers, 2009).

2) Karakteristik Organisasi

Terlepas dari apakah seseorang mempertimbangkan panggilan untuk bekerja atau tidak, pekerja sosial sering kali tertarik untuk bekerja pada organisasi yang menurut mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Bagi mereka yang sengaja ingin bekerja di *faith-based organization*, hal ini mungkin merupakan respons terhadap keyakinan agama yang sejalan dengan pendirian lembaga tersebut. Bagi yang lain, rasa cocok mungkin disebabkan oleh adanya visi untuk terlibat dalam pekerjaan yang selaras dengan nilai-nilai profesional (Frisina, 2006).

3) Alasan Pragmatis

Sementara bagi sebagian orang, gelar pekerjaan sosial yang mereka miliki menjadi alasan bagi tawaran pekerjaan, bagi sebagian lainnya hanya sekedar kebetulan bahwa mereka ditawarkan pekerjaan di *faith-based organization* yang mereka lamar atas dasar pragmatis. Namun, apa yang awalnya sekadar mendapatkan pekerjaan bisa berubah menjadi prospek karier jangka panjang (Crisp, 2014).

Dalam mengkritisi keberadaan *faith-based organization*, Furness & Gilligan (2012) mengajukan beberapa pertanyaan berikut, yaitu: Apakah FBO mempunyai kapasitas untuk memberikan layanan? Apakah FBO mampu menunjukkan bahwa mereka sama atau lebih efektif dibandingkan organisasi lain dalam memberikan layanan sosial dan pekerjaan sosial? Apakah ada nilai tambah dalam layanan yang diberikan melalui kelompok agama? Akankah mereka, misalnya, memobilisasi relawan dengan lebih efektif? Dapatkah FBO menjangkau dan melibatkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dengan lebih efektif dibandingkan kelompok masyarakat lainnya? Akankah mereka memberikan prioritas yang sama

terhadap kebutuhan anggotanya dan kebutuhan orang lain?

4. Peluang dan Tantangan Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Faith Based Organization

Bagi pekerja sosial, bekerja dengan mereka yang merupakan anggota masyarakat yang paling terpinggirkan bagi sebagian orang merupakan pengalaman utama dalam pembelajaran agama, tidak hanya bagi diri mereka sendiri (Warner, 2009), namun juga dalam menetapkan fokus pekerjaan mereka (Ranson, 2012). Perasaan 'panggilan' atau 'takdir' ini sebenarnya dapat dipahami oleh orang lain yang mengidentifikasi individu yang memiliki keterampilan, nilai-nilai, dan hasrat terhadap pekerjaan suatu organisasi (Eastham, 2002). Di sisi lain, organisasi *faith-based organization* telah sering menunjukkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan dan kredibilitas mereka (Dinham, 2012a), mungkin pertanyaannya bukan apakah mereka harus terlibat dalam penyediaan kesejahteraan, namun apakah mereka mampu melakukannya dengan cara yang memenuhi kebutuhan harapan masyarakat? Keterlibatan kelompok agama dalam penyediaan kesejahteraan sebagian bergantung pada sumber daya yang mereka miliki (Jupp, 2009), negara perlu memastikan bahwa organisasi *faith-based organization*, yang menjalankan layanan atas nama negara, atau yang memberikan layanan yang diakui negara.

Mungkin terdapat perbedaan antara teori dan praktik sehubungan dengan peran penyediaan kesejahteraan berbasis agama (Angell, 2010), dan banyak *faith-based organization* mungkin perlu mengubah arah jika mereka ingin tetap menjadi pemain penting dalam negara kesejahteraan (Lake, 2013), seperti halnya negara kesejahteraan itu sendiri yang terus mengalami perubahan, begitu pula masyarakatnya.

Program atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga berbasis agama belum tentu memiliki konten keagamaan. Cara organisasi melakukan *branding* terhadap dirinya sendiri tidak hanya penting dalam hal komunikasi dengan pengguna layanan, namun juga dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pihak donor. Terkait hal tersebut, kita dapat berkaca pada Jawad (2009: 109) yang melakukan analisis terhadap organisasi-organisasi kesejahteraan keagamaan di Lebanon

dan terlihat bahwa beberapa organisasi menarik para donor dengan alasan bahwa mereka adalah 'kekuatan yang beradab', sedangkan organisasi-organisasi lain memasarkan sumbangan sebagai bentuk 'pemujaan' keagamaan.

Faith-based organization memiliki serangkaian karakteristik khas yang membedakan mereka dari organisasi sekuler. Bahasa keyakinan, yang merupakan ungkapan agama, sering kali lebih mencerminkan norma-norma budaya di mana keberpihakan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan menjadi sasaran utama didalamnya (Clarke & Jennings 2008:15) dan hal ini sejalan dengan profesi pekerjaan sosial yang juga menaruh perhatian dan fokus praktiknya pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Dengan demikian, *faith-based organization* mencerminkan norma budaya kelompok yang membentuknya. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya dapat dibedakan dari segi struktur organisasinya, tetapi juga dari segi tujuan atau misinya (Jawad, 2009).

Mempertimbangkan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang telah mengharuskan banyak *faith-based organization* untuk berubah, berinovasi, dan bergabung dengan organisasi lain yang serupa (Lake, 2013). Dengan demikian, sifat ekspresi keagamaan bisa berubah secara signifikan. Inisiatif kecil di tingkat lokal terkadang memberikan dorongan bagi munculnya lembaga-lembaga kesejahteraan yang besar (Ferguson, 2004; Holden & Trembath, 2008). Meskipun pertumbuhan dapat membuat organisasi *faith-based organization* menjadi lebih layak secara ekonomi, hal ini juga dapat membawa tantangan bagi organisasi *faith-based organization*. Dalam situasi demikian dan seiring dengan perubahan kebutuhan populasi sasaran, *faith-based organization* mungkin perlu mendefinisikan ulang tujuannya.

Aspek tujuan selanjutnya berkaitan dengan tujuan keuangan *faith-based organization*, yaitu meskipun organisasi kesejahteraan berbasis agama cenderung merupakan organisasi sukarela nirlaba (Hiemstra, 2002), mereka mungkin perlu menghasilkan sejumlah pendapatan untuk menambah pendanaan dan sumbangan negara. Di beberapa organisasi, biaya penyediaan layanan ditanggung oleh pengguna layanan (Valins, 2011). Namun, alih-alih mewajibkan biaya yang harus dibayar oleh pengguna semua layanan, tujuan dari beberapa program mungkin mencakup hal tersebut dan menghasilkan keuntungan yang dapat

digunakan untuk mensubsidi layanan lain yang disediakan oleh organisasi (Torry, 2005).

Terkait hal tersebut, definisi Torry (2005: 3) tentang *faith-based organization* adalah 'organisasi yang terkait erat dengan tradisi keagamaan namun tidak menjadikan aktivitas keagamaan sebagai tujuan utamanya' dan ia berpendapat bahwa 'organisasi-organisasi semacam itu berada di antara organisasi keagamaan dan organisasi sekuler, dan berhak mendapatkan perlakuan tersendiri'. Bagi Torry (2005), perbedaan antara organisasi keagamaan dan *faith-based organization* bukan terletak pada apakah organisasi tersebut dijalankan oleh pemuka agama atau awam, melainkan pada aktivitas yang mereka lakukan. Oleh karena itu, selama ada hubungan atau landasan agama, karya yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut tidak dapat disebut sekuler.

Mengkritisi pandangan tersebut, bagi Unruh & Sider (2005), pertanyaan kritisnya bukanlah pada apakah organisasi tersebut berbasis agama atau tidak, melainkan apakah program yang dijalankannya berbasis agama atau tidak. Mereka mencatat bahwa program-program yang dijalankan oleh sebuah organisasi dapat berkisar dari program-program yang memiliki unsur keyakinan yang sangat eksplisit dalam programnya, yang mengharuskan staf untuk memiliki komitmen iman yang kuat sesuai dengan penekanan program, hingga program-program yang tidak terlalu eksplisit atau tidak ada muatan keyakinan yang jelas dan tidak ada persyaratan agama pada staf yang dipekerjakan untuk menjalankan program tersebut. Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Vanderwoerd (2004) bahwa secara khusus, organisasi yang memiliki identitas keimanan yang kuat dalam hal nama atau struktur organisasi sering kali memberikan layanan yang terkesan sekuler dan tidak mengandung konten keagamaan yang eksplisit.

Dalam perkembangannya, keberadaan *faith based organization* tidak dapat dilepaskan dari kehadiran kelompok kepentingan, yaitu mencakup komunitas keagamaan yang telah mendukung pengembangan organisasi sejak awal dan mengupayakan berkelanjutan atas inisiatif membentuk *faith-based organization*, komunitas profesional, termasuk pekerja sosial yang bekerja di *faith-based organization*, pengguna layanan, penyandang dana, masyarakat luas, dan dewan manajemen dari *faith-based organization*. Pengelolaan *faith-based organization* juga harus

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketegangan yang dapat muncul di antara para pemangku kepentingan dengan beragam kepentingannya. Hal tersebut salah satunya karena organisasi kesejahteraan yang mempekerjakan pekerja sosial profesional memerlukan biaya. Meskipun ada beberapa komunitas keagamaan yang mampu membayar seluruh gaji dan biaya penting lainnya dari sumber daya mereka sendiri dan dari biaya apa pun yang dibayarkan oleh pengguna layanan, banyak komunitas yang mencari dukungan dari pemerintah atau organisasi pendanaan amal lainnya yang mungkin bersedia mendukung pekerjaan mereka (Northern, 2009).

Khawatir pendanaan yang bersumber dari pemerintah akan membatasi program dan cara kerja mereka, beberapa *faith-based organization* memilih untuk tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah (Hiemstra, 2002). Perjanjian pendanaan mungkin membatasi jumlah kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan atau mengharuskan *faith-based organization* untuk memperlakukan semua pengguna layanan secara adil (Rogers, 2009). Di sisi lain, pendanaan eksternal dapat memberikan harapan baru bahwa program akan dievaluasi (Phillips et al., 2008), dan organisasi dengan penekanan agama yang kuat mungkin memiliki definisi efektivitas yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang diakui oleh lembaga pendanaan atau mitra dan pemangku kepentingan lainnya (Sherr et al., 2009). Namun, bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi pendanaan lainnya juga dapat memberikan peluang untuk membantu membentuk agenda kebijakan.

SIMPULAN

Kehadiran *faith-based organization* yang berperan dalam layanan kesejahteraan sosial merupakan suatu keniscayaan karena memiliki sejarah panjang yang berakar pada nilai-nilai keagamaan disamping terdapatnya daya jangkauan layanan kesejahteraan sosial oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah yang terbatas, sehingga keberadaan layanan kesejahteraan sosial melalui *faith-based organization* menjadi peluang yang sangat terbuka luas dalam memberi kontribusi mengatasi berbagai masalah sosial baik lokal maupun global. Di sisi lain, layanan kesejahteraan sosial yang bersifat dinamis dan global menuntut peran *faith-based organization* yang semakin terbuka dan inklusif, sehingga kesinambungan layanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh *faith-based organization* menunjukkan

karakteristik yang dapat menjawab tantangan lokal dan global dengan keterlibatan para pemangku kepentingan dari keberadaan *faith-based organization* itu sendiri dalam memberikan layanan sosial sebagai bentuk praktik profesi Pekerjaan Sosial yang sejalan antara nilai-nilai yang diusung oleh *faith-based organization* dengan nilai-nilai dalam kode etik Pekerjaan Sosial sebagai jawaban atas tantangan bagi layanan kesejahteraan Sosial dari *faith-based organization* yang sangat dibutuhkan guna mersepons dan menjadi solusi masalah-masalah sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ager, A. and Ager, J. (2011) 'Faith and the discourse of secular humanism', *Journal of Refugee Studies*, 24(3): 456–472.
- Alison, J. (2010) *Broken Hearts and New Creations: Intimations of a great reversal*, London: Darton, Longman & Todd.
- Angell, O.H. (2010) 'Sacred welfare agents in secular welfare space: the Church of Norway in Drammen', in A. Bäckström, G. Davie, N. Edgardh and P. Pettersson (eds) *Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1 Configuring the connections*, Farnham: Ashgate.
- Angell, O.H. and Wyller, T. (2006) 'The Church of Norway as an agent of welfare: the case of Drammen', in A.B. Yeung, N. Edgardh Beckman and P. Pettersson (eds) *Churches in Europe as Agents of Welfare: Sweden, Norway and Finland*, Uppsala: Institute for Diaconal and Social Studies.
- Ayton, D., Carey, G., Keleher, H. and Smith, B. (2012) 'Historical overview of church involvement in health and wellbeing in Australia: implications for health promotion partnerships', *Australian Journal of Primary Health*, 18(1): 4–10.
- Bäckström, A., Davie, G., Edgardh, N. and Pettersson, P. (2011) 'The WREP Project: building bridges', in A. Bäckström, G. Davie, N. Edgardh and P. Pettersson (eds) *Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 2 Gendered religious and social change*, Farnham: Ashgate.
- Bäckström, A., Davie, G., Edgardh, N. and Pettersson, P. (eds) (2010) *Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1 Configuring the connections*, Farnham: Ashgate.

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

- Berger, J. (2003) 'Religious non-governmental organizations: an exploratory analysis', *Voluntas* 14(1): 15–39.
- Cameron, H. (2004) 'Typology of religious characteristics of social service and educational organizations and programs: a European response', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 33(1): 146–150.
- Campbell, F. (2009) 'New development: faith and foreign policy – a perspective from the Vatican', *Public Money and Management*, 29(6): 347–350.
- Campbell, S. (2012) 'Explosion of the Spirit: a spiritual journey into the 2010 Healthcare Reform Legislation', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 31(1–2): 85–104.
- Clarke, G. (2008) '*Faith-Based Organizations* and international development: an overview', in G. Clarke and M. Jennings (eds) *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Clarke, G. and Jennings, M. (2008) 'Introduction', in G. Clarke and M. Jennings (eds) *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Cnaan, R.A. and Boddie, S.C. (2006) 'Setting the context: assessing the effectiveness of faith-based social services', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 25(3/4): 5–18.
- Cnaan, R.A., Wineburg, R.J. and Boddie, S.C. (1999) *The Newer Deal: Social work and religion in partnership*, New York: Colombia University Press.
- Crisp, B. R. (2014). *Social Work and Faith-Based Organizations*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group
- Davies-Kildea, J. (2007) *Faith in Action: A study of holistic models care, for highly disadvantaged people, which have been established in faith-based communities*, Brunswick, Victoria: The Salvation Army.
- Deines, H. (2008) 'The Catholic Worker Movement: communities of personal hospitality and justice', *Social Work and Christianity*, 35(4): 429–448.
- Dinham, A. (2009) *Faiths, Public Policy and Civil Society: Problems, policies, controversies*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Dinham, A. (2012a) *Faith and Social Capital After the Debt Crisis*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Dinham, A. and Lowndes, V. (2009) 'Faith and the public realm', in A. Dinham, R. Furbey and V. Lowndes (eds) *Faith in the Public Realm: Controversies, policies and practices*, Bristol: The Policy Press.
- Eastham, M. (2002) 'Vocation and social care', in M. Nash and B. Stewart (eds) *Spirituality and Social Care: Contributing to personal and community well-being*, London: Jessica Kingsley.
- Ebaugh, H.R., Pipes, P.F., Chafetz, J.S. and Daniels, M. (2003) 'Where's the religion? Distinguishing faith-based from secular social service agencies', *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(3): 411–426.
- Ellenson, D. (2006) 'What makes a Jewish organization "Jewish"?'', *Journal of Jewish Communal Service*, 81(3/4): 129–132.
- Fagan, D.M., Kiger, A. and van Teijlingen, E. (2010) 'A survey of faith leaders concerning health promotion and the level of healthy living activities in faith communities in Scotland', *Global Health Promotion*, 17(4): 15–23.
- Ferguson, K.M. (2004) 'Shaping street-children organizations across the Americas: the influence of political, social and cultural contexts on Covenant House and Casa Alianza', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 23(4): 85–102.
- Ferris, E. (2005) 'Faith-based and secular humanitarian organizations', *International Review of the Red Cross*, 87(2): 311–325.
- Fischer, R.L. and Stelter, J.D. (2006) 'Testing faith: improving the evidence base on faith-based human services', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 25(3/4): 5–18.
- Fix, B. and Fix, E. (2002) 'From charity to client-oriented social service production: a social profile of religious welfare associations in Western European comparison', *European Journal of Social Work*, 5(1): 55–62.
- Fokas, E. (2006) 'The Greek Orthodox Church as an agent of welfare: the case of Thiva and Livadeia', in A.B. Yeung, N. Edgardh Beckman and P. Pettersson (eds) *Churches in Europe as Agents of Welfare: England, Germany, France, Italy and Greece*,

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

- Uppsala: Institute for Diaconal and Social Studies.
- Frisina, A. (2006) 'The Catholic Church in Italy as an agent of welfare: the case of Vicenza', in A.B. Yeung, N. Edgardh Beckman and P. Pettersson (eds) *Churches in Europe as Agents of Welfare: Sweden, Norway and Finland*, Uppsala: Institute for Diaconal and Social Studies.
- Furness, S. and Gilligan, P. (2012) 'Faith-based organisations and UK welfare services: exploring some ongoing dilemmas', *Social Policy and Society*, 11(4): 601–612.
- Gardner, F. (2006) *Working with Human Service Organisations: Creating connections for practice*, South Melbourne: Oxford University Press.
- Gleeson, D.J. (2008b) 'The foundation and first decade of the National Catholic Welfare Committee', *The Australasian Catholic Record*, 85(1): 15–36.
- Göcmen, I. (2013) 'The role of *Faith-Based Organizations* in social welfare systems: a comparison of France, Germany, Sweden and the United Kingdom', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(3): 495–516.
- Gray, A., Broadbent, J. and Lavender, M. (2009) 'Editorial: faith in themes', *Public Money and Management*, 29(6): 331.
- Green, M. (2010) 'Youth workers as converters? Ethical issues in faith-based youth work', in S. Banks (ed.) *Ethical Issues in Youth Work*, 2nd edn, London: Routledge.
- Grønbjerg, K.A. and Nelson, S. (1998) 'Mapping small religious non-profit organizations: an Illinois profile', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 27(1): 13–31.
- Harris, M., Halfpenny, P. and Rochester, C. (2003) 'A social policy role for *Faith-Based Organizations*? Lessons from the UK Jewish voluntary sector', *Journal of Social Policy*, 32(1): 93–112.
- Hiemstra, J.L. (2002) 'Government relations with faith-based non-profit social agencies in Alberta', *Journal of Church and State*, 44(1): 19–45.
- Holden, C. and Trembath, R. (2008) *Divine Discontent – The Brotherhood of St Laurence: A history*, North Melbourne: Australian Scholarly Publishing.
- Hugen, B. and Venema, R. (2009) 'The difference of faith: the influence of faith in human service programs', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 28(4): 405–429.
- Jawad, R. (2009) *Social Welfare and Religion in the Middle East: A Lebanese perspective*, Bristol: The Policy Press.
- Jeppsson Grassman, E. (2010) 'Welfare in western Europe: existing regimes and patterns of change', in A. Bäckström, G. Davie, N. Edgardh, and P. and Pettersson (eds) *Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1 Configuring the connections*, Farnham: Ashgate.
- Jupp, J. (2009) 'Religion, immigration and refugees', in J. Jupp (ed.) *Encyclopaedia of Religion in Australia*, Melbourne: Cambridge University Press.
- Jupp, J. (2009) 'Religion, immigration and refugees', in J. Jupp (ed.) *Encyclopaedia of Religion in Australia*, Melbourne: Cambridge University Press.
- Kunzel, R.G. (1988) 'The professionalization of benevolence: evangelicals and social workers in the Florence Crittenton Homes, 1915–1945', *Journal of Social History*, 22(1): 21–43.
- Lake, M. (2013) *Faith in Action: HammondCare*, Sydney: University of New South Wales Press.
- Langer, N. (2003) 'Sectarian organizations serving civic purposes', in T. Tirrito and T. Cascio (eds) *Religious Organizations in Community Services: A social work perspective*, New York: Springer Publishing.
- Leis-Peters, A. (2006) 'The Protestant Church as an agent of welfare in Germany: the case of Reutlingen', in A.B. Yeung, N. Edgardh Beckman and P. Pettersson (eds) *Churches in Europe as Agents of Welfare: England, Germany, France, Italy and Greece*, Uppsala: Institute for Diaconal and Social Studies.
- Macey, M. and Carling, A. (2011) *Ethnic, Racial and Religious Inequalities: The perils of subjectivity*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Milligan, C. and Conradson, D. (2011) 'Contemporary landscapes of welfare: the "voluntary turn"??', in C. Milligan and D. Conradson (eds) *Landscapes of Voluntarism: New spaces of health, welfare and governance*, Bristol: The Policy Press.

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

- Netting, F.E., O'Connor, M.K., Thomas, M.L. and Yancey, G. (2005) 'Mixing and phasing of roles among volunteers, staff, and participants in faith-based programs', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 34(2): 179–205.
- Northern, V.M. (2009) 'Social workers in congregational contexts', *Social Work and Christianity*, 36(3): 265–285.
- Ozanne, E. and Rose, D. (2013) *The Organisational Context of Human Service Practice*, South Yarra, Victoria: Palgrave Macmillan.
- Palmer, V. (2011) 'Analysing cultural proximity: Islamic Relief worldwide and Rohingya refugees in Bangladesh', *Development in Practice*, 21(1): 96–108.
- Paton, R., Ali, H. and Taylor, L. (2009) 'Government support for *Faith-Based Organizations*: the case of a development programme for faith leaders', *Public Money and Management*, 29(6): 363–370.
- Pettersson, P. (2011) 'Majority churches as agents of European welfare: a sociological approach', in A. Backstrom, G. Davie, N. Edgardh and P. Pettersson (eds) *Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 2 Gendered religious and social change*, Farnham: Ashgate.
- Phillips, I., Raske, M., Bordelon, T.D., Lautner-Uebelhor, T. and Collins, J.F. (2008) "'Catholic Charities" neighbor to neighbor: preliminary findings of a faith-based initiative', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 27(4): 361–383.
- Ranson, D. (2012) *The Hospitality of Ministry: Exercising Christian ministry with a trinitarian heart*, Strathfield, NSW: St Paul's Publications.
- Reid, R. (2008) 'Succession planning and generational change I', in N. Ormerod (ed.) *Identity and Mission in Catholic Agencies*, Strathfield, NSW: St Paul's Publications.
- Ressler, L.E. and Hodge, D.R. (2003) 'Silenced voices: social work and the oppression of conservative narratives', *Social Thought*, 22(1): 125–142.
- Ressler, L.E. and Hodge, D.R. (2005) 'Religious discrimination in social work', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 24(4): 55–74.
- Rogers, R.K. (2009) 'Community collaboration: practices of effective collaboration as reported by three urban faith-based social service programs', *Social Work and Christianity*, 36(2): 326–345.
- Rogers, R.K., Yancey, G. and Singletary, J. (2005) 'Methodological challenges in identifying promising and exemplary practices in urban faith-based social service programs', *Social Work and Christianity*, 32(3): 189–208.
- Scales, T.L. (2011) "'Accepting a trust so responsible": Christians caring for children at Buckner Orphans Home, Dallas, Texas, 1979–1909', *Social Work and Christianity*, 38(3): 332–355.
- Scales, T.L. and Kelly, M.S. (2011) "'To Give Christ to the Neighborhood": a corrective look at the Settlement Movement and early Christian social workers', *Social Work and Christianity*, 38(3): 356–376.
- Schneider, J.A. (1999) 'Trusting that of God in everyone: three examples of Quaker-based social service', *Social Work and Christianity*, 35(2): 123–147.
- Sherr, M.E. and Rogers, R.K. (2009) 'Administrative practices in religious organizations: describing fundamental practices', *Social Work and Christianity*, 36(2): 125–126.
- Tangenberg, K.M. (2005) 'Faith-based human service initiatives: considerations for social work practice and theory', *Social Work*, 50(3): 197–206.
- Thyer, B.A. and Myers, L.L. (2009) 'Religious discrimination in social work academic programs: whither social justice?', *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 28(1–2): 144–160.
- Torry, M. (2005) *Managing God's Business: Religious and Faith-Based Organizations and their management*, Aldershot: Ashgate.
- Unruh, H.R. and Sider, R.J. (2005) *Saving Souls, Serving Society: Understanding the faith factor in church-based social ministry*, New York: Oxford University Press.
- Valins, O. (2011) 'The difference of voluntarism: the place of voluntary sector care homes for older Jewish people in the United Kingdom', in C. Milligan and D. Conradson (eds) *Landscapes of Voluntarism*: New

Share: Social Work Journal	Volume: 14	Nomor: 2	Halaman: 75-87	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) https://doi.org/10.40159/share.v14i.259283
----------------------------	------------	----------	----------------	---

spaces of health, welfare and governance, Bristol: The Policy Press.

- Vanderwoerd, J. (2004) 'How faith-based social service organizations manage secular pressures associated with government funding', *Nonprofit Management and Leadership*, 14(3): 239–262.
- Warner, K.D (2009) 'The farm workers and the Franciscans: reverse evangelization as social prompt for conversion', *Spiritus*, 9(1): 69–88.
- Williamson, S.A. (2005) 'She saw something in me: relationships between faith community volunteers and mothers leaving welfare', *Social Work and Christianity*, 32(2): 151–167.
- Williamson, S.A. and Hodges, V.G. (2006) 'It kind of made me feel important', *Social Work and Christianity*, 35(2): 43–57.
- Wittberg, P.A. (2013) 'Faith-based umbrella organizations: implications for religious identity', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(3): 540–562.
- Yancey, G. I. and Atkinson, K.M. (2004) 'The impact of caring in faith-based social service programs: what participants say', *Social Work and Christianity*, 31(3): 254–266.